

MESKI DITOLAK,

RKUHAP

**RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA**

TETAP DISAHKAN!

DPR telah mengesahkan RKUHAP menjadi undang-undang meskipun berbagai elemen masyarakat menolak revisi tersebut.



Walaupun RKUHAP diklaim telah memenuhi 99,9% aspirasi masyarakat, nyatanya ada gelombang penolakan dan kritik dari publik.

RKUHAP mengatur tata cara penegakan hukum pidana yang mengatur proses peradilan pidana dari awal penyelidikan hingga penegakan putusan akhir. Perubahan dalam RKUHAP dinilai dapat melemahkan hak warga dan memperluas kewenangan aparat penegak hukum tanpa kontrol.

Koalisi Masyarakat hadir dan menolak pengesahan RKUHAP pada 18 November kemarin. Aparat terutama kepolisian dinilai diberikan kewenangan yang sangat luas sementara hak warga semakin dipersempit, sehingga ada kekhawatiran semua orang dapat ditangkap dan dipidana tanpa proses hukum yang memadai. RKUHAP juga dinilai disusun tanpa transparansi dan konsultasi publik yang memadai.

Masyarakat berhak mendapatkan proses hukum yang transparan dan akuntabel, Revisi KUHAP seharusnya kembali ke prinsip itu. **KUHAP baru akan berlaku pada awal Januari 2026.**